

# **STRATEGI IRAN DALAM MENGATASI DAMPAK**

## **EMBARGO KANADA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

**RISKA AWALIA IBRAHIM**

**4517023035**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Strategi Iran Dalam Mengatasi Dampak Embargo Kanada

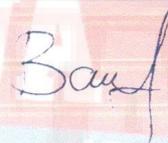
Riska Awalia Ibrahim

4517023035

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.

Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A.

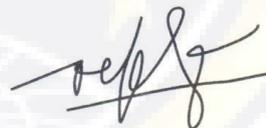
Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
1.2.1 Batasan Masalah .....	5
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Konseptual .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Tipe Penelitian .....	10
1.5.2 Jenis dan Sumber Data .....	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.5.4 Teknik Analisis Data .....	10
1.6 Rancangan Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Asumsi Dasar Konsep Kerjasama Internasional .....	12
2.1 Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional .....	14
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Sejarah Hubungan diplomatik Kanada – Iran .....	17
3.2 Perekonomian Iran Sebelum Embargo.....	24
3.3 Perekonomian Iran pasca Embargo .....	25
3.4 Dampak Embargo Terhadap Perekonomian Iran .....	28
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Kerjasama Yang Dilakukan Iran.....	31
4.2 Upaya Pemulihan Yang Dilakukan Oleh Iran.....	34
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 KESIMPULAN.....	39
5.2 SARAN.....	40

## ABSTRAK

Pengembangan nuklir Iran menuai pro dan kontra, menjadikan Iran harus memiliki strategi untuk mengatasi tekanan embargo yang diberikan oleh negara yang kontra terhadap pengembangan nuklirnya, namun penelitian ini berfokus pada tahun 2010-2016. Dalam hal ini, Iran dengan strateginya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa negara di Asia dan Ukraina hingga ikut berunding dalam program nuklir Iran dengan negara P5+1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan telaah pustaka dalam pengumpulan data baik dari buku elektronik, jurnal online, artikel, dan berita online. Konsep yang digunakan adalah konsep Kerjasama Internasional. Kerjasama yang dilakukan Iran cukup mampu sebagai upaya untuk mengatasi dampak embargo Kanada dibuktikan dengan Cina dan Kamboja yang tetap dan mengimpor minyak dari Iran, Cina dan India yang membantu dalam proses pengangkutan minyak, dan Ukraina melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak nasional Iran.

Kata Kunci : Iran, Kanada, Nuklir, Embargo, Kerjasama Internasional.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Iran Dalam Mengatasi Dampak Embargo Kanada”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala dan halangan penelitian dalam penyusunan skripsi ini dan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini juga selama masa perkuliahan penulis, yaitu kepada:

1. Mama yang selama ini sudah mendukung baik dalam bentuk materi maupun moril. Terima kasih atas dukungannya dari awal masa perkuliahan hingga sampai dititik ini. Terima kasih karena selalu percaya dan selalu mengedepankan pendidikan. Untuk Alm. Bapak terima kasih banyak telah mengajarkan bahwa kehilangan telah mengajarkan banyak hal.

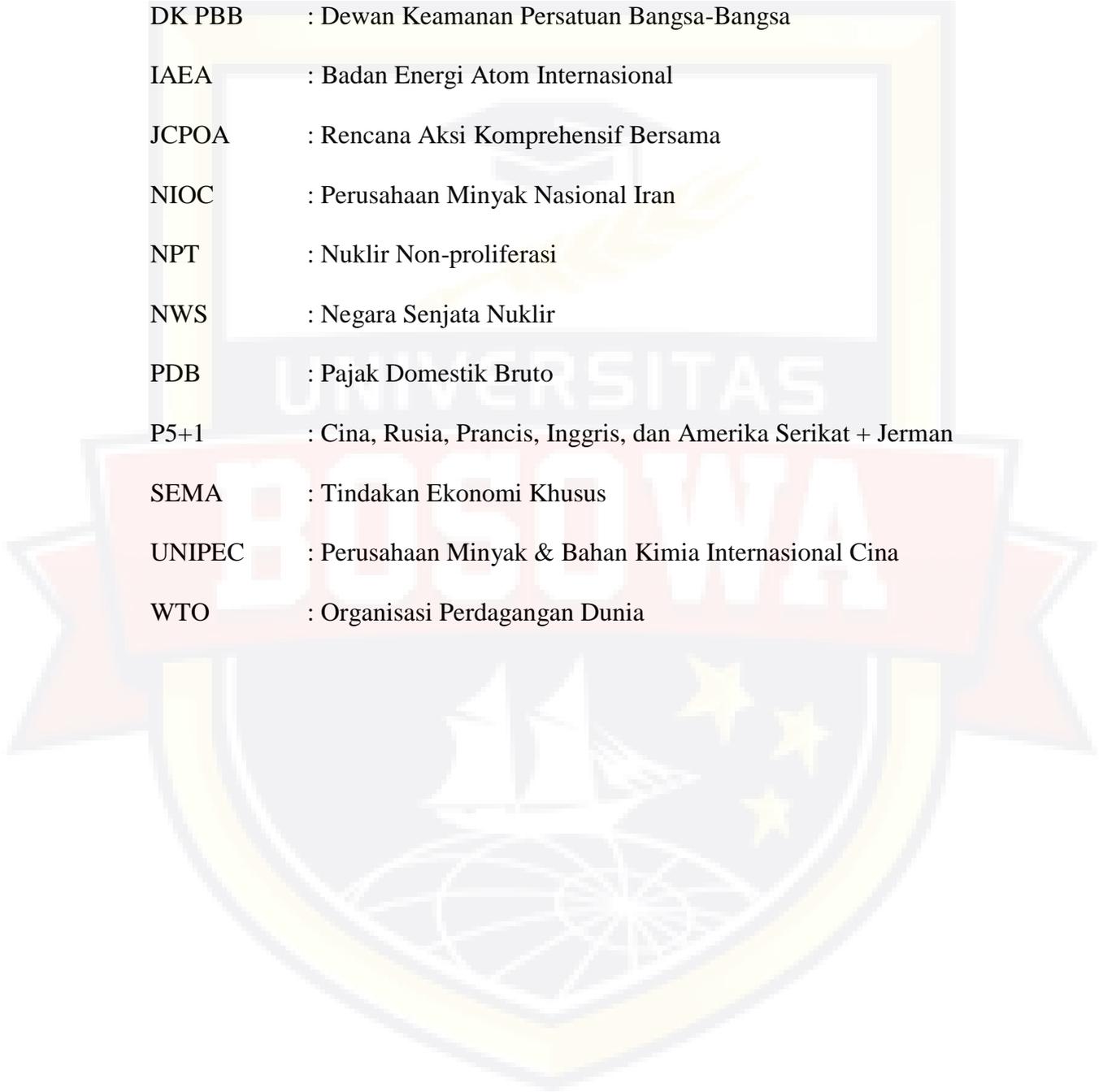
2. Saudara saya, Dayat, Okta, dan Radit yang selalu memberi dukungan kapanpun dan dimanapun.
3. Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
4. Yth. Bapak Ketua Prodi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar, Zulhair Burhan, S.IP., M.A.
5. Yth. Bapak Muh. Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A. selaku pembimbing satu dan Yth. Ibu Beche Bt Mamma, S.IP., M.A. selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh staff dan dosen yang telah membimbing dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Yth. Pak Budi dan Ibu Mega yang telah mengurus segala administrasi penulis.
8. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
10. Teman-teman AIROS yang mendukung sejak awal hingga akhir perkuliahan.
11. Sucitra, Meddy, dan Wulan terima kasih telah berjuang bersama.
12. Yudho, teman penulis yang selalu menjawab setiap pertanyaan dari penulis.

13. Rino, Ramdhan, Zainal, dan Chaeder, teman penulis yang selalu menemani bermain game disaat penulis butuh hiburan.
14. Uwi, Meddy, Ima, Alya, Yana, Nining, dan Rini, teman penulis yang selalu menemani penulis hingga akhir perkuliahan dan menjadi pendengar yang baik.
15. Angga, Puput, Juse, Alif, Eki, Fatur, Fikri, Dhani, Arya dan anggota Sabi Project lainnya, terima kasih telah mengenalkan hal-hal terkait event.
16. Nur Fadhilah Muktar, teman penulis yang selalu mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat.
17. Aswar Salam, terima kasih karena selalu membantu jika laptop penulis bermasalah maupun membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengetikan skripsi ini.

Makassar, 1 September 2021

Penulis,

Riska Awalia Ibrahim

**DAFTAR SINGKATAN**

CEP	: Kebijakan Pengendalian Kebijakan
DK PBB	: Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa
IAEA	: Badan Energi Atom Internasional
JCPOA	: Rencana Aksi Komprehensif Bersama
NIOC	: Perusahaan Minyak Nasional Iran
NPT	: Nuklir Non-proliferasi
NWS	: Negara Senjata Nuklir
PDB	: Pajak Domestik Bruto
P5+1	: Cina, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat + Jerman
SEMA	: Tindakan Ekonomi Khusus
UNIPEC	: Perusahaan Minyak & Bahan Kimia Internasional Cina
WTO	: Organisasi Perdagangan Dunia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kanada adalah suatu negara yang dikenal dengan perekonomiannya yang cukup pesat di negara bagian Barat dan Iran adalah suatu negara di bagian di Timur Tengah yang dikenal sebagai negara konflik. Seperti yang dilakukan setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, maka suatu negara harus bekerjasama dan menjalin hubungan diplomatik, seperti Kanada dan Iran yang menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik demi mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam hubungan diplomatik Kanada dan Iran, Kanada menerapkan Controlled Engagement Policy (CEP) dalam mengatur hubungan politik dan ekonominya. Penerapan CEP merupakan bentuk keprihatinan Kanada, salah satunya terhadap pengembangan nuklir Iran karena nuklir dianggap sebagai senjata yang berbahaya dan mematikan karena itu beberapa negara yang mengembangkan nuklir dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia karena dapat menciptakan konflik dan perpecahan. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Adapun isi dari Controlled Engagement Policy (CEP) yang diterapkan oleh Kanada dalam mengatur hubungannya dengan Iran yaitu salah satunya terkait program nuklir Iran dan kurangnya rasa hormat terhadap kewajiban non-proliferasi yang dimana dalam perjanjian non-proliferasi berisikan terkait pemberian hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai dan hanya lima negara yang diperbolehkan

untuk memiliki senjata nuklir yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, pengayaan uranium Iran yang sudah mencapai hingga 20 persen dan sudah dianggap dapat dijadikan sebagai senjata atom dan hal ini mengharuskan Kanada memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran dan karena Iran masih tetap mengembangkan nuklirnya yang berarti masih melanggar CEP tersebut sehingga Kanada harus memberikan sanksi dan melakukan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran karena menganggap Iran dapat membahayakan dunia.

Pemberian sanksi ekonomi terhadap aktor negara maupun aktor non negara menjadi instrument penting bagi komunitas internasional dalam usaha untuk penegakan norma-norma internasional dan hukum. Sanksi tersebut seringkali mencakup terkait pembatasan kontrak resmi dan diplomatik atau perjalanan, penerapan tindakan hukum untuk membatasi atau melarang perdagangan atau kegiatan ekonomi. Sejak mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB, Kanada di bawah partai konservatif banyak memberikan sanksi perekonomian terhadap Iran baik itu sanksi bilateral, unilateral maupun sanksi trilateral. (Murtasidin, 2014)

Pada tahun 2010, Kanada menjatuhkan sanksi unilateral terhadap Iran yang berupa batasan ekspor bahan nuklir dan teknologi ke Iran dan berlanjut hingga tahun 2011, Kanada bersama dengan Amerika Serikat dan England menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang dimana sanksi ini berupa larangan transaksi dengan keuangan Iran, dan larangan ekspor-impor minyak, gas, pertambangan serta logam dan semua barang-barang yang digunakan dalam

petrokimia, industry migas asal Iran dan diberlakukan pasca International Atomic Energy Agency (IAEA) mengeluarkan resolusi terkait dengan nuklir Iran dan mengatakan ada bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa Iran sedang berusaha untuk membangun senjata melalui nuklirnya. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Kemudian, pada tahun 2011, Kanada menjatuhkan sanksi trilateral bersama dengan Amerika Serikat dan England yang dimana sanksi tersebut terkait berupa larangan transaksi Bank Sentral Iran dengan bank Kanada, Amerika Serikat, dan England. (Sadegh, 2012)

Hingga pada tahun 2012, Kanada resmi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dilihat dari tindakan Kanada yang menutup kedutaannya di Iran dan sebaliknya, Kanada mengusir diplomat Iran dari wilayahnya. Kanada mengambil tindakan ini didasari atas dasar kekhawatirannya dengan staf-staf diplomatiknya di Teheran (Nugraha, 2012)

Berbagai sanksi unilateral hingga pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kanada hanya bertujuan untuk melarang bahkan cenderung untuk menggagalkan program nuklir Iran ternyata belum memiliki dampak yang cukup signifikan terkait pengembangan nuklirnya karena Iran masih tetap mengembangkan teknologi nuklirnya. Meskipun embargo Kanada belum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengembangan nuklir Iran, akan tetapi Iran kehilangan salah satu mitra dagang terbesar Iran yaitu Kanada.

Di tahun yang sama dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh Kanada, Iran juga diberikan sanksi oleh DK PBB, Uni Eropa, dan negara sekutu yang ikut memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran. Pada tahun 2012, badan statistik Iran menyatakan secara resmi terkait kenaikan inflasi yang bermula pada tahun 2012 mencapai 30 persen dan menjadi rekor sejarah di Iran. Dalam setahun, harga pangan di Iran meningkat hingga 60 persen. Pakar ekonomi mengatakan jumlah sesungguhnya jauh lebih tinggi. Sejak 2011, perekonomian Iran bergantung pada minyak, maka dari itu negara Barat khususnya Kanada melakukan embargo minyak dan mata uang Iran yaitu Rial kehilangan nilainya karena nilai tukar satu dolar pada saat itu mencapai 35.000, Para pedagang di ibukota Iran, Teheran mengatakan bahwa kemampuan beli warga Iran berkurang secara drastis dan hal ini menjadikannya sebagai krisis ekonomi. (Nikaeen, 2013)

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai Presiden telah mengubah kebijakan luar negeri Iran yang dimana pada tahun 2013 Iran melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya yaitu menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat pada saat dan membahas tentang politik Iran-Amerika setelah bertahun-tahun lamanya, di tahun yang sama Presiden Hassan Rouhani melakukan komunikasi dengan perdana Menteri Inggris setelah lebih dari satu dekade terakhir. Kemudian, Presiden Hassan Rouhani mendukung perundingan terkait nuklir Iran oleh P5+1 yang dimana tahun sebelumnya Iran sempat

menolak proposal terkait perundingan yang ditawarkan oleh negara P5+1 karena Iran tidak ingin menghentikan program nuklirnya pada saat itu (Rizky, 2011)

Perundingan nuklir Iran ini berlanjut hingga pada tahun 2015 Presiden Hassan Rouhani melakukan kerjasama internasional dan kesepakatan oleh Iran bersama dengan negara P5+1 dengan penandatanganan Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) yang isinya sepakat untuk mencabut sanksi ekonominya terkait dengan program nuklir Iran dengan imbalan melepaskan bagian dari program nuklir agar menghambat pengembangan nuklir Iran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya akan membahas terkait strategi yang dilakukan oleh Iran untuk mengatasi dampak embargo Kanada.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi terarah, fokus, dan pembahasannya tidak terlalu luas, maka penulis harus membatasinya dengan hanya berfokus kepada strategi yang dilakukan oleh Iran dalam mengatasi dampak embargo Kanada pada tahun 2010 - 2016.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah yang diatas, maka rumusan masalah yang akan dilampirkan yaitu : Bagaimana strategi Iran dalam mengatasi dampak embargo Kanada?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dengan judul “Bagaimana Strategi Iran untuk Mengatasi Dampak Embargo Kanada” yaitu untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh Iran dalam mengatasi dampak embargo Kanada.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penelitian, diantaranya:

- a. Bagi penulis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.
- b. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi baru dalam literatur studi Ilmu Hubungan Internasional dan

- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para penstudi yang meneliti terkait penelitian serupa.

#### **1.4 Kerangka Konseptual**

Karena penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis kerjasama yang dilakukan oleh Iran untuk menangkal dampak embargo yang diberlakukan oleh Kanada, maka konsep kerjasama internasional menjadi konsep relevan dengan penelitian ini.

Kerjasama internasional terjadi ketika dua atau lebih negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini karena, dalam banyak kasus, setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk mencapai tujuannya, terutama dalam hal ekonomi.

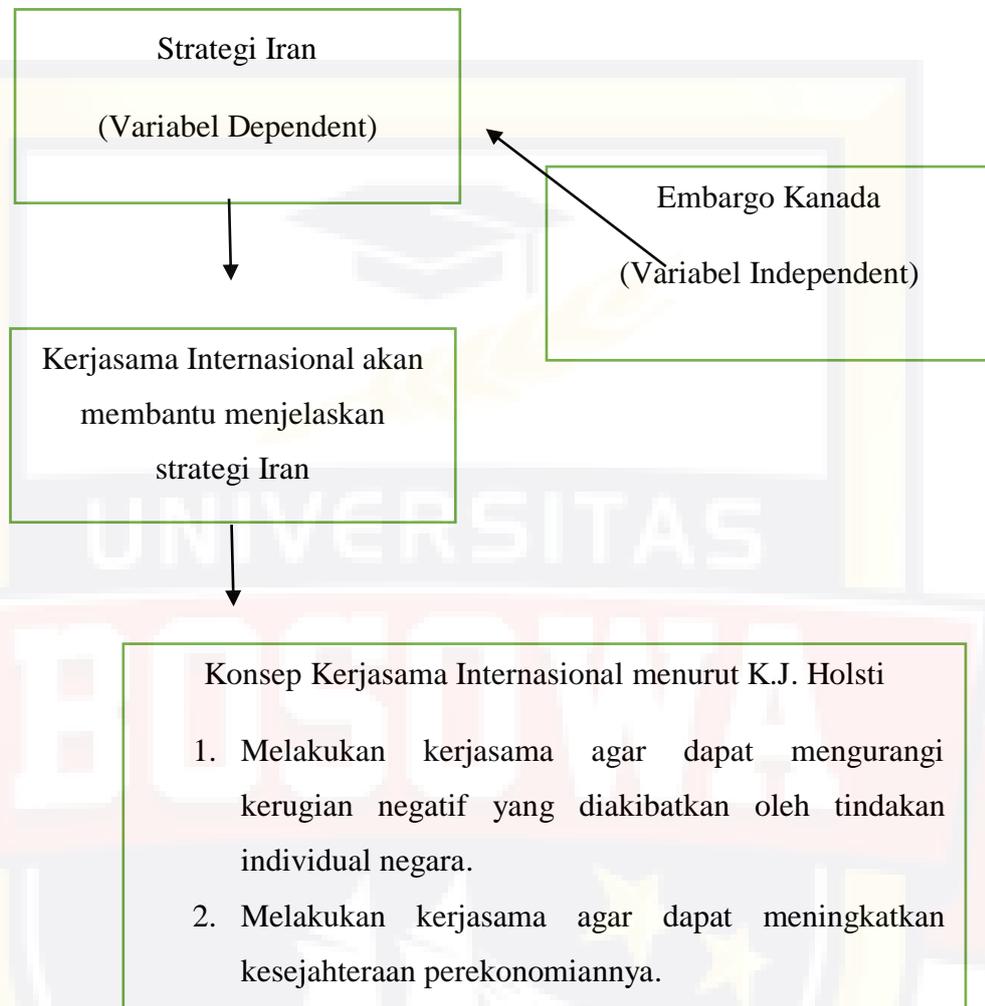
Menurut K.J. Holsti, kerja sama internasional dimulai sebagai akibat dari banyaknya tantangan nasional, regional, dan global yang muncul sehingga perlu mendapat perhatian negara lain. Konsep kerjasama internasional adalah hal yang berkaitan dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait bentuk kerjasama yang digunakan oleh Iran untuk mengatasi dampak embargo yang diberikan oleh Kanada. Berikut adalah definisi kerjasama menurut K.J.Holsti, diantaranya :

- a) Keyakinan bahwa masing-masing pihak memenuhi kepentingan, nilai, atau tujuan yang menghasilkan sesuatu.

- b) Keyakinan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan membantunya dalam mencapai tujuan dan nilai-nilainya.
- c) Kesepakatan atau masalah khusus antara dua negara atau lebih untuk memanfaatkan kepentingan bersama atau konflik kepentingan.
- d) Norma resmi atau informal yang mengatur transaksi di masa depan yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian.
- e) Transaksi antar negara yang harus disetujui oleh masing-masing negara. (Zulkifli, 2012)

Kerjasama multilateral merupakan penekanan utama kerjasama internasional. John Ruggie mendefinisikan multilateral sebagai suatu bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang diungkapkan dalam berbagai bentuk institusi, seperti organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum terjadi, seperti tatanan internasional. (Dougherty&Pfaltzgraff 1997:419)

### Skema Konsep



**Gambar 1.1 skema konsep**

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif eksplanatif.

### **1.5.2 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dari data sekunder yaitu dari penelusuran online seperti buku elektronik, e-journal dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait, artikel, dan berita online.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara online dengan cara penelusuran literatur seperti e-book, e-journal dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait, artikel, dan berita online melalui internet.

### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa data ditekankan pada data-data non matematis. Dan analisa dilakukan terhadap persepsi otoritas terkait buku elektronik, e-journal dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait, artikel, dan berita online.

## 1.6 Rancangan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut;

1. Bab pertama, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terkait dengan konsep kerjasama internasional.
3. Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang terkait dengan perekonomian Iran.
4. Bab keempat, penulis akan membahas mengenai analisis dan pembahasan terkait bentuk kerjasama dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh Iran.
5. Dan bab terakhir yaitu bab kelima, penulis akan membahas mengenai memberikan kesimpulan dan saran terkait penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan terkait konsep yang akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah konsep Kerjasama Internasional.

#### **2.1 Asumsi Dasar Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional berawal dari kondisi interdependensi yang terjadi diantara negara satu dan negara yang lainnya. Isu-isu ekonomi, misalnya keseimbangan, dan hambatan perdagangan, aset cadangan, nilai tukar, kebijakan fiskal, dan ekonomi pasar kapitalis merupakan isu yang secara universal dianggap paling menggambarkan kondisi interdependensi antar negara. (Puspitasari, 2019)

“Kerjasama internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses di mana aktor negara yang terkait bersama berkerjasama untuk memecahkan tantangan dengan belajar dari satu sama lain. mengadakan diskusi dan negosiasi tentang masalah yang dihadapi, mencari elemen yang mendukung solusi spesifik, dan menegosiasikan kesepakatan berdasarkan saling pengertian di antara para pihak..” (K.J. Holsti, 1998:65)

“Kerjasama dapat terjalin apabila sejauh mana aktor satu dan aktor yang lainnya percaya bahwa mereka akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari konsep kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan aktor, dimana hasil dari kerjasama ini akan menimbulkan efek simbiosis mutualisme yang dimana akan saling menguntungkan untuk para aktor

yang bekerjasama dibandingkan dengan melakukan sesuatu secara individual. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 419)

Ada beberapa alasan mengapa aktor satu dan aktor lainnya ingin melakukan kerjasama, diantaranya;

1. Aktor ingin melakukan kerjasama agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.
2. Aktor ingin melakukan kerjasama agar dapat meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Aktor ingin melakukan kerjasama karena adanya suatu isu atau permasalahan yang mengancam keamanan bersama.
4. Aktor juga ingin melakukan kerjasama agar dapat mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan individual negara yang memberikan dampak terhadap negara yang lainnya. (K.J. Holsti, 1995: 362-363)

Fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateral didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:419)

Adapun terjadinya tindakan hubungan kerjasama, didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kemajuan di tingkat teknologi yang akhirnya menimbulkan kemudahan dalam hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga menimbulkan efek saling ketergantungan.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Pergeseran sifat perang, seperti keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela melalui kerjasama internasional.
4. Terbentuknya kesadaran dan keinginan untuk berunding, salah satu strategi kerjasama internasional didasarkan pada premis bahwa masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah melalui negosiasi. (Kartasmita,1997:19)

## **2.2 Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Kerjasama internasional mencakup kerjasama di berbagai bidang, diantaranya untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, keamanan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya :

### **1. Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral adalah suatu keadaan dimana kedua pihak yang terlibat memiliki hubungan timbal balik dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Kerja sama bilateral paling sering digunakan

ketika dua negara bekerja sama dalam masalah politik, ekonomi, atau keamanan. Pelaksanaan kerjasama bilateral ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor, diantaranya :

- 1) Memperhatikan kepentingan nasional.
- 2) Menjaga perdamaian, dan
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Putri, 2019)

Adapun contoh dari kerjasama bilateral yaitu kerjasama bilateral antara Indonesia – Jepang yang melakukan kerjasama demi menciptakan kemajuan dibidang ekonomi dan IPTEK. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral antara Indonesia – Arab Saudi yang melakukan kerjasama dalam penanganan pekerja imigran Indonesia.

## 2. Kerjasama Regional

Kerjasama Regional adalah suatu keadaan yang menggambarkan hubungan kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu yang saling berdekatan. Kerjasama regional ini biasanya digunakan pada saat melakukan kerjasama terkait persoalan politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan antar negara-negara yang berada di kawasan atau region yang saling berdekatan. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama regional ini yaitu :

- 1) Atas dasar kedekatan dan kepentingan bersama.
- 2) Memfaktorkan dalam konteks sejarah (historis).

- 3) Fokus pada sumber daya alam dan pemasaran produk ekspor.
- 4) Masalah teknis. (Putri, 2019)

Adapun contoh dari kerjasama regional yaitu kerjasama antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Selain itu, ada juga kerjasama regional antara negara-negara yang berada di kawasan Eropa yang disebut dengan Uni Eropa (UE).

### 3. Kerjasama Multilateral

Kerjasama Multilateral adalah suatu keadaan yang menggambarkan hubungan kerjasama antara negara-negara tanpa memandang kawasan atau wilayah tertentu yang terdekat dan umumnya kerjasama multilateral terdiri dari lebih dari tiga negara. (Putri, 2019)

Ada dua jenis anggota dalam kerjasama multilateral ini, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Anggota utama adalah negara yang memiliki sedikit pengaruh ataupun memiliki kekuatan yang cukup. Adapun contoh dari kerjasama multilateral yaitu kerjasama multilateral antara negara-negara yang terdiri dari lebih tiga negara dan tidak memandang kawasan atau wilayah tertentu yang terdekat yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, ada juga kerjasama multilateral lainnya yang mengatur terkait perdagangan internasional yaitu World Trade Organization (WTO).

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1 Sejarah Hubungan diplomatik Kanada – Iran

Kanada merupakan negara demokratis yang menyambut baik hubungan diplomatik dengan negara lain. Kanada memelihara hubungan diplomatik dengan sejumlah negara, termasuk di Timur Tengah. Iran adalah salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Kanada. Sejak tahun 1955, Kanada dan Iran telah menjalin hubungan kerjasama; tahun ini, semua kepentingan antara kedua negara ditandatangani melalui kedutaan Inggris di Teheran, Iran.

Menurut Quaest, dukungan Inggris untuk kepentingan Kanada dan Iran hanya berlangsung sampai Kanada memperoleh kemandiriannya pada tahun 1959, ketika mendirikan pos diplomatik di Teheran, dan kemudian membuka kedutaan besarnya di Iran pada tahun 1961. Hubungan antara Kanada dan Iran pada awalnya cukup baik. waktu itu. Pada akhir 1970-an, hampir 1000 pekerja dan kontraktor Kanada ditempatkan di Iran, menunjukkan kekuatan hubungan mereka.. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Namun, hubungan antara Kanada dan Iran memburuk pada tahun 1979 sebagai akibat dari revolusi Iran, yang termasuk krisis penyanderaan di kedutaan AS di Teheran tahun itu. Sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat, Kanada bergerak cepat untuk mengamankan beberapa diplomat AS yang lolos dari penangkapan melalui kedutaan Kanada di Teheran, dan kemudian

membantu diplomat AS meninggalkan Iran menggunakan paspor Kanada pada tahun 1980. Selain itu, kedutaan Kanada di Iran ditutup di protes kasus penyanderaan di kedutaan Amerika Serikat. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Pasca revolusi Iran, hubungan antara Kanada dan Iran mengalami pasang surut, hingga pada saat Kanada melihat Iran sebagai ancaman yang cukup signifikan bagi perdamaian dunia, ditambah dengan Kanada yang menerapkan Controlled Engagement Policy (CEP) dalam mengatur hubungan politik dan ekonominya dengan Iran menganggap bahwa Iran telah melanggar CEP tersebut yang terkait dengan pengembangan nuklir . Penerapan CEP merupakan bentuk keprihatinan Kanada, salah satunya terhadap pengembangan nuklir Iran karena nuklir dianggap sebagai senjata yang berbahaya dan mematikan karena itu beberapa negara yang mengembangkan nuklir dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia tak terkecuali Iran. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Adapun isi dari Controlled Engagement Policy (CEP) yang diterapkan oleh Kanada terdiri dari empat subyek, diantaranya :

- 1) Situasi hak asasi manusia di Iran.
- 2) Program nuklir Iran dan kurangnya rasa hormat terhadap kewajiban non-proliferasi.
- 3) Kasus Zahra Kazemi.
- 4) Peran Iran di kawasan. (Kerckhove, 2012)

Rasa khawatir Kanada atas program nuklir Iran juga disebabkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB karena Dewan Keamanan PBB

bahkan mengeluarkan hingga empat kali.resolusi. Keempat resolusi tersebut adalah :

1) Resolusi 1737 pada tanggal 23 Desember 2006

Resolusi ini memberlakukan sanksi ekonomi dan komersial berupa pembekuan terhadap sepuluh entitas penting terkait dengan program nuklir dan balistik.

2) Resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007

Resolusi ini memberlakukan pembekuan aset 13 entitas baru yang terkait dengan program nuklir atau pengawal revolusi Iran ditambah dengan pembekuan embargo pembelian senjata dan pembatasan pinjaman terhadap Iran.

3) Resolusi 1803 pada tanggal 3 Maret 2008

Resolusi ini memberlakukan larangan entitas dan individu dengan membekukan aset dan larangan perjalanan.

4) Resolusi 1929 pada tanggal 9 Juni 2010

Resolusi ini memberlakukan suatu pembatasan baru pada investasi Iran dan melarang penjualan ke Iran terkait senjata berat khusus seperti tank, pesawat tempur, hingga helikopter. (Murtasidin, 2014)

Akan tetapi pemerintah Iran tetap melanjutkan dan mengembangkan nuklirnya dengan alasan bahwa nuklir yang dikembangkan oleh Iran tidak lain sebagai bagian dari kepentingan nasional yang dimana akan digunakan sebagai pemenuhan

kebutuhan energi strategis untuk penguatan sektor utama dalam negeri yaitu industri dan teknologi karena kebutuhan energi dalam juga meningkat terutama energi listrik. Walaupun demikian, banyak negara-negara Barat termasuk Kanada dan Amerika Serikat yang menilai dan mencurigai program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.

Hingga pada tahun 2006, sikap dan tindakan Kanada telah mengalami perubahan pasca menjabatnya Perdana Menteri Stephen Harper dari partai Konservatif yang dimana orientasi atau perputaran kebijakan luar negeri Kanada menjadi sangat agresif dalam mendukung berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan yang ditetapkan oleh sekutu terdekatnya, diantaranya Amerika Serikat dan Israel. Hal tersebut mengakibatkan hubungan Kanada dan Iran semakin tidak menunjukkan perkembangan yang positif. (Olivia Razmana Poeteri, 2014)

Banyak sanksi sepihak dan multilateral terhadap Iran diberlakukan oleh Kanada di bawah naungan partai konservatif. Hal ini didasarkan pada tanggapan keras Kanada terhadap program nuklir Iran, yang mencakup sanksi sepihak yang diberlakukan pada tahun 2010 di bawah Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA). Berdasarkan SEMA, Kanada telah menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

- 1) Melarang berurusan dengan individu dan entitas yang ditunjuk, seperti transaksi properti atau penyediaan barang atau jasa keuangan terkait melalui individu atau perusahaan yang ditunjuk.
- 2) Melarang mengekspor atau memberikan dukungan kepada Iran baik dalam bentuk persenjataan, peralatan pemyulingan minyak dan gas, dan barang-barang lainnya.
- 3) Melarang berbagi informasi teknis tentang item proliferasi.
- 4) Melarang investasi baru di sektor minyak dan gas Iran, serta penyediaan atau penerimaan jasa keuangan.
- 5) Melarang penyediaan atau penerimaan layanan keuangan dari lembaga atau entitas keuangan Iran yang memiliki cabang atau kantor di Kanada, atau sebaliknya
- 6) Melarang menjalin hubungan perbankan atau lainnya dengan lembaga keuangan Iran, serta memberikan utang kepada pemerintah Iran dengan cara apapun.
- 7) Melarang penyediaan layanan untuk pengoperasian dan pemeliharaan kapal yang dimiliki, dikendalikan, atau dioperasikan Iran. (Murtasidin, 2014)

Kemudian, pada November 2011, di Kanada kembali menjatuhkan sanksi multilateral bersamaan dengan Amerika Serikat dan England. terhadap Iran sebagai sanksi tambahan yang didasari setelah keluarnya resolusi kekhawatiran atas kegiatan

nuklir Iran dari International Atomic Energy Agency (IAEA) dan mengatakan bahwa adanya bukti yang cukup “kredibel” yang menyatakan bahwa Iran sedang berusaha membangun senjata nuklir. Adapun sanksi yang dijatuhkan oleh Kanada terhadap Iran di bawah The Special Economic Measures Act (SEMA), yaitu :

- 1) Melarang seluruh transaksi keuangan dengan Iran.
- 2) Memperluas daftar barang yang dilarang untuk digunakan dalam industri petrokimia, minyak dan gas di Iran. Larangan atas transaksi keuangan dan barang-barang yang digunakan dalam petrokimia, industri minyak dan gas di Iran ini tidak berlaku untuk kontrak yang masuk sejak sebelum tanggal 22 November 2011.
- 3) Mengubah daftar barang yang dilarang untuk memasukkan item tambahan yang dapat digunakan dalam program nuklir Iran.
- 4) Menghapus entitas tertentu yang telah direkomendasikan untuk dihapus oleh menteri luar negeri yang tidak lagi menyajikan keprihatinan proliferasi untuk Kanada. (Murtasidin, 2014)

Beberapa bulan kemudian, sejak diberlakukannya sanksi tambahan ini, Kanada kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat lagi yaitu pada awal tahun 2012, Kanada melarang ekspor ke Iran dari berbagai macam jenis barang yang dapat digunakan sebagai pembuatan kapal, eksplorasi mineral, sektor pertambangan,

produksi logam, dan industry telekomunikasi. Kanada juga melarang impor gas alam, minyak, produk petrokimia dari Iran, serta penyediaan pemasaran dan jasa keuangan. (Murtasidin, 2014)

Pasang surut hubungan diplomatik Kanada-Iran hanya bertahan hingga tahun 2012. Tepatnya pada September 2012, Kanada menutup kedutaan besarnya di Teheran, Iran dan mengusir diplomat Iran dari Ottawa, Kanada. Pengusiran diplomat Iran ini dilakukan karena adanya beberapa alasan, salah satunya alasannya adalah ketidakpatuhan Iran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditujukan ke Iran terkait program nuklirnya dan kebijakan regional Iran. (Canada, 2016)

Dengan ketidakpatuhan Iran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait program nuklirnya maka dapat dikatakan bahwa Iran juga melanggar Controlled Engagement Policy (CEP) yang telah ditetapkan oleh Kanada dalam mengatur hubungan politik dan ekonominya dengan Iran sehingga Kanada merasa harus memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran dan karena Iran masih tetap mengembangkan nuklirnya yang berarti masih melanggar CEP ini sehingga Kanada melakukan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran karena menganggap Iran dapat membahayakan dunia.

### 3.2 Perekonomian Iran Sebelum Embargo

Menurut sejarah, Iran merupakan negara dengan sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian (agraris), berbeda dengan saat ini yang dimana produksi minyak dan gas alam menjadi sumber perekonomian utama bagi Iran. Tidak hanya itu, Iran memiliki uranium yang cukup untuk mengembangkan nuklirnya. Akan tetapi hal ini menarik perhatian dan pandangan negatif dari beberapa negara Barat. Salah satunya adalah Kanada, Kanada khawatir dengan adanya nuklir Iran akan mengancam perdamaian dunia.

Iran termasuk dalam daftar lima besar sebagai negara penghasil energi yang memiliki cadangan dengan jumlah total 157 miliar barel atau 10 persen dari total minyak dunia serta cadangan gas sebesar 1.187,3 triliun kaki persegi atau 16 persen dari total cadangan gas alam dunia. Jika keduanya dijumlahkan, maka kekayaan yang dimiliki Iran mencapai US\$ 35,3 triliun yang dimana cadangan minyaknya bernilai US\$18,1 triliun, sedangkan untuk cadangan gas Iran bernilai US\$17,2 triliun. Selain itu, Iran juga memiliki fasilitas yang mendukung aktivitas agar mampu memproduksi minyak dan gas cadangan dengan volume yang cukup besar, hal ini membuat Iran masuk ke dalam daftar sepuluh besar sebagai negara dengan nilai produksi terbesar di dunia dengan kemampuan memproduksi minyak rata-rata 2,5 - 3 juta barel per hari. (Sinaga, 2018)

Dengan cadangan minyak dan cadangan gas alam yang dimiliki oleh Iran dan dengan jumlah produksi yang cukup besar sehingga dapat

diasumsikan bahwa kondisi Iran dalam jangka panjang cukup stabil. Sektor minyak dan gas ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional negara Iran maupun untuk ekspor ke negara lain. (Sinaga, 2018)

### **3.3 Perekonomian Iran pasca Embargo**

Pada saat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1737 pada tanggal 23 Desember 2006 sebagai penyelesaian dengan seruan agar Iran mau memberhentikan pengayaan uraniumnya. Namun Iran menghiraukan resolusi tersebut dan tetap melanjutkan pengayaan uraniumnya dengan dalih Iran ingin tetap menggunakan haknya dan menggunakan energi nuklir demi tujuan-tujuan yang damai seperti yang telah dijamin dalam Non-Proliferation Treaty yang dimana pokok utama dari isi Non-Proliferation Treaty (NPT) adalah :

#### **1. Non-Proliferasi**

Hanya Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet (yang kewajiban dan haknya berlanjut ke Rusia), Inggris, dan Amerika Serikat yang diizinkan memiliki senjata nuklir. Kelima negara tersebut telah berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-Nuclear Weapon States (NWS) kecuali mereka menanggapi serangan nuklir atau konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang bersekutu dengan Nuclear Weapon States (NWS). Pakta tersebut, bagaimanapun, menyatakan bahwa lima negara yang diizinkan untuk menggunakan senjata nuklir tidak akan menggunakannya

untuk melawan negara-negara non-NWS kecuali mereka menanggapi serangan nuklir atau konvensional oleh negara-negara yang bersekutu dengan Negara-Negara Senjata Nuklir (NWS). Kepastian itu tidak ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal ini dapat berubah dari waktu ke waktu karena perjanjian tersebut belum dibuat dengan benar.

## 2. Perlucutan Senjata

Negara-negara Nuclear Weapon States (NWS) bertujuan untuk mengejar rencana untuk mengurangi stok mereka dari pembekuan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal VI dan pembukaan perjanjian. “Sebuah perjanjian tentang perlucutan senjata umum dan komprehensif tunduk pada kontrol internasional yang ketat dan efektif,” menurut Pasal VI. Pasal I menjelaskan bahwa negara-negara senjata nuklir (NWS) menyatakan bahwa mereka tidak akan membujuk negara non-NWS untuk memperoleh senjata nuklir. Persuasi oleh Non-Nuclear Weapon States (NWS) secara alternatif dapat didefinisikan sebagai doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya.

## 3. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

Setiap negara diberikan hak untuk menggunakan tenaga nuklir untuk tujuan damai berdasarkan perjanjian ini. Beberapa dari negara-negara ini sedang mengembangkan uranium secara damai

atas dasar bahwa ia dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jika suatu negara diawasi oleh Non-Proliferation Treaty (NPT), tidak akan bisa secara sembunyi-sembunyi mengembangkan teknologi nuklir untuk digunakan sebagai senjata. (Wikipedia, 2021)

Kenyataan bahwa Iran tetap ingin mengembangkan teknologi nuklirnya meskipun telah dikeluarkannya resolusi 1773 pada tahun 2006 memicu kecurigaan negara barat. Pada tahun 2010 Kanada memberikan sanksi unilateral terhadap Iran dan pada tahun 2011 Kanada beserta Kanada dengan Amerika Serikat dan England yang dimana sanksi tersebut mencakup larangan transaksi keuangan dengan Iran dan barang-barang yang digunakan dalam petrokimia, industry minyak dan gas di Iran. Sanksi ini diberlakukan setelah keluarnya resolusi kekhawatiran atas kegiatan nuklir Iran dari International Atomic Energy Agency (IAEA) dan mengatakan bahwa adanya bukti yang cukup “kredibel” yang menyatakan bahwa Iran sedang berusaha membangun senjata nuklir.

Menurut Katzman, sejak tahun 2006 dan dengan perkembangan konflik nuklir Iran, Dewan Keamanan PBB telah sering memberlakukan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran. Sebagai akibat dari ini, pembatasan internasional dan administrasinya oleh internasional organisasi, perekonomian Iran sangat dipengaruhi dengan adanya sanksi larangan impor minyak mentah dari negara Iran yang dimana minyak mentah Iran turun dari 2,5 barel/hari hingga 3 juta barel/hari pada tahun 2011 dan menjadi 1,1 juta barel/hari pada tahun 2013. Dengan demikian,

ekonomi Iran telah menurun 5% pada tahun 2013 karena pembatasan yang dikenakan pada sektor swasta. (Homayoun et al, 2016)

Selain Kanada, program pengayaan uranium Iran juga sangat berpengaruh terhadap hubungannya dengan Uni Eropa dianggap dapat memicu kekhawatiran di kancah internasional sehingga Uni Eropa juga ikut serta dalam menekan program nuklir Iran dan meminta Iran untuk bersikap konstruktif dalam mengatasi permasalahan nuklir. Karena terus didesak oleh kongres Amerika Serikat, maka Uni Eropa melakukan diplomasi dan pemberian sanksi yang berupa embargo minyak mentah Iran. Rencana embargo minyak mentah Iran ini dilakukan sebagai pengupayaan untuk melumpuhkan perekonomian Iran. Pada tahun 2012, Uni Eropa telah memberikan sanksi terhadap Iran yang dimana sanksi tersebut mencakup pembekuan aset-aset milik Bank Sentral Iran, larangan pembiayaan, asuransi dan petrokimia Iran, larangan ekspor peralatan kunci dan teknologi untuk sektor petrokimia Iran, dan UE pun turut melarang berbagai perdagangan diantaranya perdagangan emas, berlian, dan logam-logam berharga dengan bank sentral dan lembaga publik Iran. Hal ini dimaksudkan agar Iran mendapat tekanan agar bersedia ataupun turut melakukan perundingan dan memangkas pendanaan kegiatan nuklir Iran. (Ermayanti, 2018)

### **3.4 Dampak Embargo Terhadap Perekonomian Iran**

Embargo yang dilakukan Kanada terhadap Iran adalah upaya yang bisa dilakukan Kanada untuk menekan bahkan cenderung menggagalkan

pengembangan nuklir Iran ternyata belum memiliki dampak yang cukup signifikan bagi program nuklir Iran karena Iran masih tetap mengembangkan teknologi nuklirnya. Meskipun embargo Kanada belum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengembangan nuklir Iran, akan tetapi Iran kehilangan salah satu mitra dagang terbesar Iran yaitu Kanada.

Pada tahun-tahun awal pemberian sanksi, sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran sebagian besar adalah sanksi non-ekonomi dan oleh karena itu statistik ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun-tahun ini awal pemberian sanksi, mereka tidak memiliki efek dramatis terhadap perekonomian Iran. Kemudian, pada tahun 2012, sanksi ekonomi diintensifkan yang dimana sanksi pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya berdampak cukup parah pada ekonomi Iran. Dengan demikian, pada tahun 2012, sanksi tersebut menurunkan ekspor Iran sebanyak 28 persen. Jumlah penurunan nilai ekspor ini meningkat pada tahun 2013 yang mencapai hingga 40 persen dan pada tahun 2014 telah mencapai 30 persen. (Homayoun et al, 2016)

Mengingat efek dari sanksi perekonomian yang diberikan kepada Iran dan jika ekspor Iran tidak terkena sanksi maka perekonomian Iran terutama dalam sektor ekspor dapat meningkat pada tahun 2012 menjadi \$32 miliar. Menurut Bank Sentral Iran dan perusahaan minyak nasional Iran, ekspor minyak turun 1 juta barel/hari pada tahun 2012 dan hasilnya dikonformasi memperoleh penurunan yang cukup anjlok dalam ekspor

Iran sebagai akibat dari sanksi yang dijatuhkan terhadapnya. Ekspor Iran yang hilang pada tahun 2013 sama dengan \$44 miliar dan jumlah ini mencapai \$28 miliar pada tahun 2014. (Homayoun et al, 2016)

Pada tahun 2011, perekonomian Iran cukup bergantung pada sektor minyak dan gas alam, sedangkan sebagian besar embargo yang diberikan terhadap Iran, utamanya sanksi unilateral pada tahun 2010 dan sanksi trilateral pada tahun 2011 yang telah diberikan oleh Kanada bersama dengan Amerika Serikat dan England yang berkaitan dengan minyak sehingga tingkat ekspor setelah tahun 2011 mengalami penurunan.



**BOSOWA**

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menganalisa kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Iran dan upaya pemulihan embargo dengan menggunakan konsep Kerjasama Internasional.

#### **4.1 Kerjasama Yang Dilakukan Iran**

Kerjasama internasional merupakan hal yang penting bagi setiap aktor negara karena dengan melakukan kerjasama internasional maka kepentingan nasional aktor negara tersebut bisa terpenuhi dengan tujuan yang saling menguntungkan karena pada dasarnya setiap negara membutuhkan negara lain untuk membantu kepentingan nasionalnya.

Meskipun telah diembargo oleh beberapa negara terutama Kanada atas permasalahan program nuklir, hal ini tidak memiliki dampak yang cukup signifikan untuk pengembangan nuklir Iran, akan tetapi Iran telah kehilangan mitra dagangnya. Karena itu Iran mengupayakan untuk mengimbangi perekonomiannya dengan melakukan strategi berupa Kerjasama Internasional dengan beberapa negara, diantaranya:

##### **a. Kerjasama Internasional Iran dan Negara Asia**

Dalam mengatasi mengatasi embargo dari Kanada beserta negara Barat, Iran memilih cara lain untuk tetap bisa mengimbangi perekonomiannya yang pada saat itu telah diembargo oleh negara Barat. Dalam hal ini, Iran melakukan kerjasama dengan beberapa negara diantaranya negara Cina, India, dan beberapa negara Asia

lainnya yang menolak terkait sanksi yang diberikan oleh Kanada, Amerika Serikat beserta sekutunya. Negara Kambojapun menyatakan bahwa negaranya akan tetap mengimpor dan menyuling minyak dari Iran di sebuah pabrik atau fasilitas industri lokal yang mengolah minyak mentah menjadi potroleum yang bisa langsung digunakan ataupun bisa diolah menjadi bahan baku bagi industry petrokimia yang sementara mengalami pembangunan. Pembangunan ini dilakukan diatas lahan seluas 365 hektar area di Sihanoukville, Kamboja.

Tidak hanya itu, larangan penyediaan, pengoperasian, maupun impor barang untuk pembuatan kapal cukup menyulitkan bagi Iran untuk mengangkut minyak, akan tetapi hal ini tetap dapat diimbangi oleh Iran karena Iran bekerjasama dengan China dan India dalam proses pengangkutan minyak Iran yang dimana Iran juga melakukan suatu penawaran terkait dengan penjualan minyak dengan harga yang lebih murah dengan tujuan mencari keuntungan karena melakukan penawaran ini cukup mampu menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki tujuan politik.

b. Kerjasama Internasional Iran dan Ukraina

Pada saat Kanada beserta sekutunya sibuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran, Iran juga sedang sibuk menyiapkan strategi yang harus dilakukan untuk mengimbangi perekonomiannya.

Dengan adanya kerjasama internasional antara Iran dan negara-negara di Asia terutama China dan India ini dapat mengimbangi

perekonomian Iran yang dilanda embargo besar-besaran oleh Kanada, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara Barat yang lainnya.

Iran bekerja sama dengan perusahaan energi Ukraina di samping kerja sama internasional dengan beberapa negara Asia, termasuk kontrak senilai sekitar \$800 juta yang ditandatangani antara perusahaan teknik dan perusahaan minyak yang berafiliasi dengan Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) dan InterNaft Gas Prom Pars Co. konsorsium..

Pengembangan ladang minyak di Kouhmond, Boushkan, dan Kouhkaki dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari perusahaan Iran dan Ukraina. Ladang minyak Kouhmond terletak di lokasi dengan sekitar 1 miliar barel cadangan minyak mentah, ladang minyak Boushkan terletak di lokasi dengan sekitar 340 juta barel cadangan minyak mentah, dan ladang minyak Kouhkaki terletak di lokasi dengan cadangan minyak mentah yang banyak. sekitar 780 juta barel. Sebelumnya, Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) telah mendapatkan kesepakatan dengan UNIPEC, perusahaan minyak dan petrokimia internasional yang berbasis di China, untuk memperluas ekspor minyak ke China sebesar  $\pm 500.000$  barel per hari. (Waluyo, 2013)

## 4.2 Upaya Pemulihan Yang Dilakukan Oleh Iran

Meskipun telah melakukan kerjasama internasional dengan beberapa negara Asia dan Ukraina, Iran tentu masih membutuhkan mitra dagangnya yang lain, terutama negara barat karena negara barat merupakan pasar ekspor minyak terbesar kedua Iran. Embargo yang dikenakan terhadap Iran dari tahun ke tahun mampu membuat Iran mengalami penurunan perekonomian terutama di sektor ekspor minyak dan gas yang dimana minyak dan gas adalah dua hal pokok yang menunjang perekonomian Iran. Embargo ini memaksa Iran untuk melakukan kerjasama internasional.

Dalam hal ini Iran melakukan kerjasama internasional dengan ikut bergabung dalam perundingan nuklir Iran pada tahun 2013, yang dimana tindakan ini belum pernah dilakukan oleh Presiden-Presiden Iran sebelumnya.

Keinginan Presiden Hassan Rouhani untuk ikut bergabung dalam perundingan nuklir Iran didasari keinginan untuk menuntaskan masalah nuklir dan juga untuk mengatasi berbagai macam sanksi yang diberikan terhadapnya.

### a. Kerjasama Internasional Iran dan Negara P5+1

Pada tahun 2013, lima negara yang memiliki hak veto atau perwakilan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu negara Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat ditambah dengan Jerman yang disebut dengan negara P5+1, menyepakati solusi atas konflik program nuklir Iran dengan delegasi dari Iran dalam perundingan di Jenewa, Swiss.

Perundingan nuklir Iran ini diadakan agar negara-negara yang prihatin ataupun khawatir atas pengembangan nuklir Iran tidak perlu khawatir lagi karena dalam perundingan nuklir Iran tersebut telah disetujui bahwa Iran harus menghentikan sebagian aktivitas pengayaan uraniumnya dalam jangka waktu setengah tahun atau enam bulan lamanya. Dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap Iran.

Melalui perundingan ini, pengayaan uranium Iran yang sudah mencapai hingga 20 persen dan sudah bisa dijadikan sebagai senjata atom terpaksa harus dikurangi atas dasar perundingan ini, yang dimana pengayaan uranium Iran yang sudah mencapai hingga 20 persen ini harus dikurangi menjadi 5 persen yang berarti Iran harus mengurangi pengayaan nuklirnya sebanyak 4x lipat dari sebelumnya dan program nuklir Iran harus terus diawasi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak tahun 2014. Hal ini dimaksudkan agar Iran dapat mengembangkan teknologi nuklirnya secara diam-diam karena telah diawasi oleh IAEA.

Kerjasama Internasional ini tentunya bertujuan damai dengan tujuan agar Iran dapat menghentikan program pengayaan uraniumnya yang jika dikembangkan terus menerus akan bisa menjadi senjata dan tidak menimbulkan lagi kekhawatiran bagi masyarakat internasional.

Perundingan nuklir Iran ini menunjukkan suatu kemajuan positif yang cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya Iran telah menolak untuk ikut berunding dan menyatakan dengan tegas bahwa nuklirnya hanya untuk kepentingan

damai. Hingga pada tahun 2013 diadakannya perundingan terkait program nuklir Iran di Jenewa, Swiss dan Iran akhirnya ikut berpartisipasi dan perundingan ini terus berlanjut hingga tahun 2015.

Pada Juli 2015, lima anggota tetap DK PBB yaitu Cina, Prancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat ditambah Jerman, yang dipimpin oleh Uni Eropa, membuat kesepakatan dengan Iran mengenai program nuklirnya yang disebut Joint Comprehensive Plan Of Action yang disingkat JCPOA dan disahkan oleh Resolusi DK PBB 2231 tahun 2015.

Kanada menyambut baik konfirmasi dari International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa Iran telah memenuhi semua komitmen yang telah dirundingkan dalam JCPOA. Di tahun yang sama, Kanada juga mengumumkan kesediaannya untuk melanjutkan diskusi dengan Iran, termasuk kemungkinan memulihkan kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau JCPOA, adalah perjanjian nuklir timbal balik di mana Iran bergabung dan menyetujui JCPOA dengan imbalan negara-negara P5+1 mencabut sanksi terhadap Iran dalam jangka pendek dengan imbalan Iran menanggukkan sebagian uraniumnya. kegiatan pengayaan. Dengan kata lain, Iran harus menghentikan sementara kegiatan pengayaan uraniumnya selama enam bulan. Iran juga harus dituntut untuk lebih transparan dalam kesepakatan JCPOA ini, serta meratifikasi dan mengimplementasikan protokol JCPOA. Kesepakatan nuklir Iran juga memberi kesempatan yang belum

pernah terjadi sebelumnya bagi Iran untuk terlibat dengan ekonomi global yaitu gelombang pencabutan sanksi untuk membuka jalan bagi suatu potensi peningkatan pesat Foreign Direct Investment (FDI) dan pertumbuhan di sektor minyak sehubungan dengan embargo yang telah diberikan terhadap Iran telah menurunkan perekonomiannya terutama dibidang ekspor minyak dan gas alam.

Penandatanganan atau ratifikasi perjanjian JCPOA berdampak pada hubungan Iran dengan negara-negara P5+1 karena selain pelonggaran sanksi ekonomi, sebelum ratifikasi perjanjian JCPOA, Iran memiliki hubungan yang kurang bersahabat dengan beberapa anggota JCPOA. Ketegangan dalam kemitraan telah muncul sebagai akibat dari penolakan Iran untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya. Setelah penandatanganan kesepakatan nuklir JCPOA, hubungan antara Iran dan negara-negara P5+1 mulai normal. Setelah penandatanganan JCPOA, normalisasi tidak terbatas pada negara-negara P5+1., melainkan juga Kanada yang sebelumnya juga memiliki hubungan yang kurang harmonis dikarenakan ketegangan akibat Iran yang tidak ingin menghentikan program nuklirnya yang berakhir dengan pemberian sanksi dan pemutusan hubungan diplomatik. Akan tetapi, setelah Iran menandatangani atau meratifikasi JCPOA akhirnya Kanada ingin melakukan lagi diskusi terkait hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Sejak penerapan JCPOA pada tahun 2016, ekonomi Iran telah menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama yang

disektor pemulihan perdagangan minyak dan gas alam. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Iran meningkat sebesar 13,4 persen pada tahun 2016.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Iran yang terus menerus mengembangkan teknologi nuklirnya dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia terlebih pasca keluarnya resolusi dari International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menyatakan bahwa ada bukti yang sangat kuat bahwa Iran berusaha untuk membangun senjata nuklir. Kanada yang saat itu berada dibawah naungan partai konservatif dan lebih menekankan terkait permasalahan hak asasi manusia merasa khawatir atas pengembangan nuklir Iran.

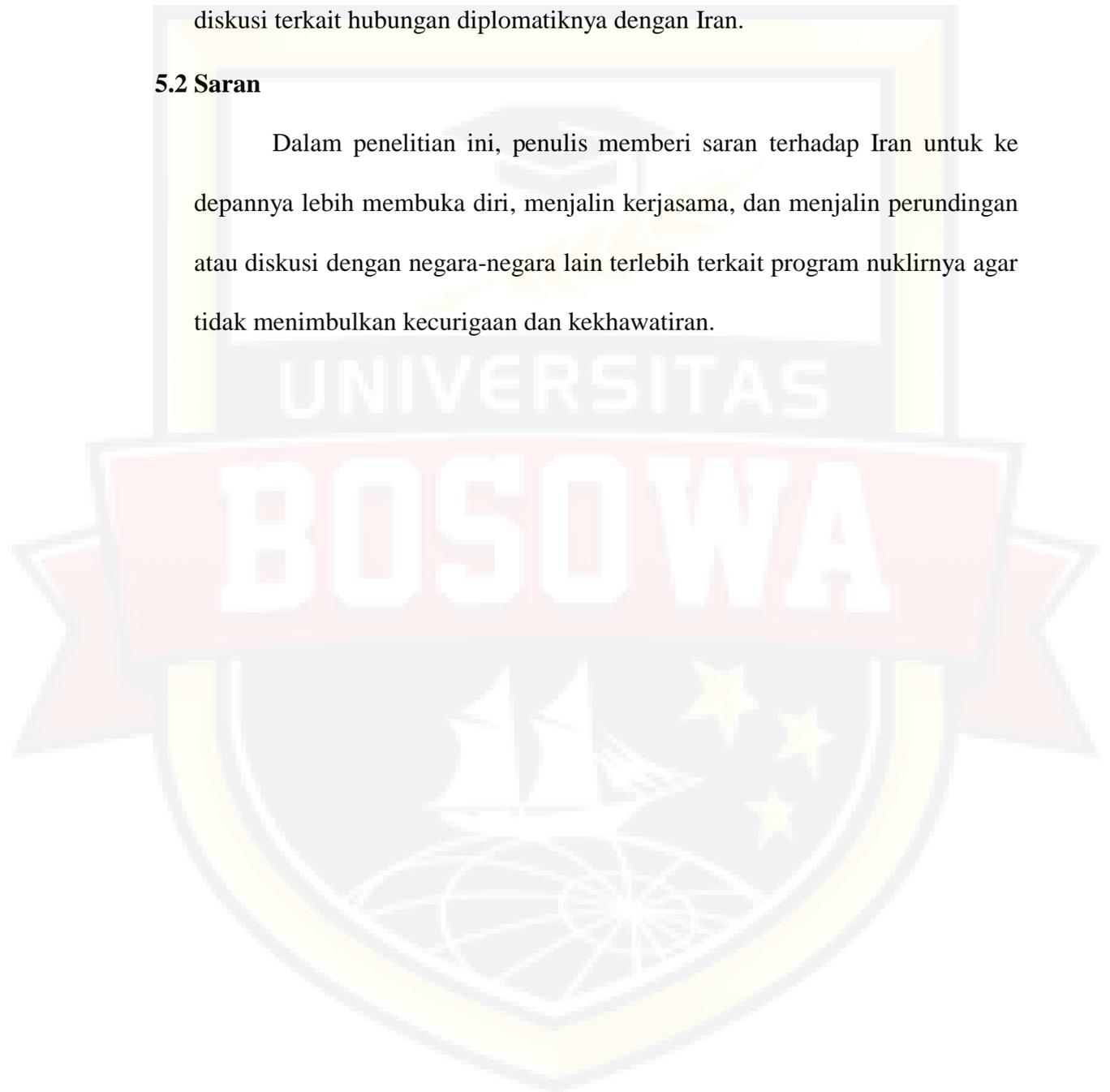
Karena merasa khawatir, Kanada memutuskan untuk melakukan embargo bahkan melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran sebagai upaya untuk menggagalkan program nuklir Iran. Namun, hal ini belum memiliki dampak yang cukup signifikan dikarenakan Iran masih tetap mengembangkan teknologi nuklirnya. Bukan hanya Kanada, melainkan Amerika Serikat dan juga sekutunya melakukan embargo terhadap Iran disaat yang bersamaan dan hal ini membuat Iran cukup kesulitan dalam menjalankan perekonomiannya.

Untuk mengurangi dampak dari embargo tersebut, Iran melakukan beberapa strategi dengan melakukan kerjasama internasional dengan beberapa negara di Asia dan Ukraina. Namun, untuk memulihkan perekonomiannya Iran melakukan kerjasama internasional dengan negara P5+1, karena dengan

bekerjasama dengan negara P5+1 semua sanksi internasional yang diberikan terhadap Iran dicabut bahkan Kanada mengatakan ingin kembali melakukan diskusi terkait hubungan diplomatiknya dengan Iran.

## **5.2 Saran**

Dalam penelitian ini, penulis memberi saran terhadap Iran untuk ke depannya lebih membuka diri, menjalin kerjasama, dan menjalin perundingan atau diskusi dengan negara-negara lain terlebih terkait program nuklirnya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Canada, G. o. (2016, Februari 5). Canada-Iran Relations. Retrieved from <https://www.canadainternational.gc.ca/iran/canada-iran/canada-iran.aspx?lang=eng>
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. (1997). *Contending Theoris*. New York : Happer and Row Publisher
- Ermayanti, D. (2018). Pengaruh Embargo Minyak Mentah Iran Oleh Uni Eropa. *JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018, 5*, 1-8. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id>
- Homayoun, S et al. (2016). The Effect Of Economic Sanctions on Iran’s Export. *Iranian Economic Review, Volume 20, Issue 1, Summer 2016, 20*, 111-124. Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2717632](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2717632)
- Kartasasmita. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung : Diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Administrasi Bandung
- Kerckhove, F. d. (2012, September). Canada and Iran. 1-11. Retrieved from [https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/43/attachments/original/1413677289/Canada\\_and\\_Iran\\_Looking\\_Beyond\\_the\\_Present.pdf?1413677289](https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/43/attachments/original/1413677289/Canada_and_Iran_Looking_Beyond_the_Present.pdf?1413677289)
- K.J. Holsti. (1998). *International Politics : A Framework For Analysis (7<sup>th</sup> Edition)*. Kanada: Pearson College Publisher
- Murtasidin, B. (2014, february). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kanada Terhadap Iran. 1-11.
- Nikaeen, S. (2013, Juni 12). Tercekiknya Perekonomian Iran. Retrieved from <https://www.dw.com/id/tercekiknya-perekonomian-iran/a-16876297>
- Nugraha, F. (2012, September 08). Kanada Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2012/09/08/414/686928/kanada-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-iran>
- Olivia Razmana Poeteri, D. S. (2014, Januari). Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran. *I*, 45-54.
- Puspitasari, L. H. (2019). Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *1*. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/26131>

- Putri, A. S. (2019, 12 19). Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>
- Rizky, R. M. (2011). Perubahan Kebijakan Nuklir Iran Di Era Pemerintahan Hassan Rouhani. 1-15.
- Sadegh, A. (2012, November 26). The Impact of Sanctions on Iran: An Effective Policy? 1-55. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10393/23859>
- Sinaga, R. M. (2018). Kepentingan Iran Dan Indonesia Dalam Kerjasama Minyak dan Gas Pada Tahun 2016. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, 6 (3)1093-1106, 1094. Retrieved from [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1202045069%20-%20Rama%20Marito%20Sinaga%20\(07-27-18-12-10-50\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1202045069%20-%20Rama%20Marito%20Sinaga%20(07-27-18-12-10-50).pdf)
- Waluyo, R. R. (2013, Juni 10). Upaya Pemerintah Iran Menghadapi Sanksi Embargo Yang Diberlakukan Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Iran Pada Tahun 2012.
- Wikipedia. (2021, April 4). Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian\\_Nonproliferasi\\_Nuklir](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir)
- Zulkifli. (2012, July 10). Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). *Thesis*.